

## **Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan**

**Muhammad Sabarudin**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

**Abstrak:** Proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam di Indonesia pertama kali melewati bermacam-macam kontak, diantaranya : kontak jual beli, kontak perkawinan serta kontak dakwah secara langsung, baik secara individu maupun kolektif. Dari berbagai macam kontak inilah proses pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung meskipun dalam ruang lingkup yang sederhana.

Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama dalam masyarakat muslim di Indonesia. Disamping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana. Sebagai contohnya; sistem pengajaran yang menggunakan konsep halaqah yang dilakukan ditempat-tempat peribadatan seperti masjid, mushalla bahkan di rumah-rumah para ulama.

Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi serta mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren yang bernuansa Islami; umat Islam di Minangkabau mengambil alih Surau sebagai peninggalan adat masyarakat Minangkabau menjadi lembaga pendidikan Islam; dan demikian halnya masyarakat Aceh mengubah fungsi Meunasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Sistem pendidikan di era penjajahan Belanda, sangat kontradiktif dengan sistem pendidikan tradisional Islam dalam berbagai aspek keagamaan. Sistem pendidikan di era penjajahan Belanda tidak memberikan tekanan sama sekali pada pengetahuan keagamaan, karena mereka lebih menitikberatkan pada kepentingan duniawi semata. Tujuan pendidikan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda sebagai pegawai pemerintahannya. Namun, harus diakui bahwa sistem serta metode pendidikan dan pengajaran yang diimplementasikan dalam lembaga pendidikannya jauh lebih baik dan modern bila dibandingkan dengan sistem dan metode pada lembaga pendidikan tradisional Islam.

Pendidikan Islam di zaman pemerintahan Jepang terkait erat dengan konsep Nippon Cahaya Asia. Hal ini disebabkan pemerintahan pada saat itu membutuhkan umat Islam terkait dengan perang Asia Timur Raya. Begitu pula umat Islam yang mengharapkan kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh pemerintahan Jepang. Hal ini tergambar bagaimana upaya Jepang dalam memberikan ruang dan materil kepada masyarakat muslim dalam menerapkan sistem pendidikan Islam di berbagai madrasah dengan penuh pengawasan.

Dalam tulisan ini, penulis mengungkapkan fakta sejarah yang terjadi pada masa awal dan sebelum kemerdekaan yang di kemudian hari bisa dikategorikan dalam

perspektif kajian pendidikan Islam, serta menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kemajuan pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Pendidikan Islam, Sebelum Kemerdekaan*

## **Pendahuluan**

Sebelum Islam datang ke Indonesia dalam abad XIII, maka telah terjelma kerajaan-kerajaan yang susunan pemerintahannya, corak masyarakatnya, alam pikirannya banyak di pengaruhi Hinduisme dan Budhisme. Kerajaan-kerajaan itu, terdapat di selat Malaka, di Sumatera Utara, di Kalimantan Utara dan Timur. Mereka memiliki susunan ekonomi yang tergantung pada perdagangan laut.

Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M dan pendapat baru menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 M.<sup>1</sup> Namun yang pasti, hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh.<sup>2</sup>

Kegiatan pendidikan Islam di Aceh lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya Islam di Aceh. Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa perdagangan disebabkan oleh datangnya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, dapat dilihat melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, ajaran tasawuf dan tarekat, serta jalur kesenian dan pendidikan, yang semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Indonesia termasuk di daerah serambi mekkah (Aceh) yang merupakan tempat awal masuknya Islam di nusantara hingga berkembang menjadi sebuah kerajaan besar hingga merambat ke belahan nusantara lainnya.

Setelah masa kerajaan Islam di Indonesia telah berakhir dengan dimulainya masa kolonial belanda, eksistensi pendidikan Islam di Indonesia tetap terus tumbuh dan sudah berlangsung sangat panjang dan sudah memasyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia.

Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari apa yang diilustrasikan pada kebijakan-kebjakan pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah Jepang yang telah menjajah bangsa Indonesia selama berabad-abad. Oleh karena itu

<sup>1</sup> A. Abdullah Mustofa, , Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah,( Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)hal: 23

<sup>2</sup> Abdullah Taufik, Ed. Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983)

periodisasi sejarah pendidikan Islam dibagi dalam dua garis besar, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, untuk melihat lebih jauh berkenaan dengan situasi pola dan kebijakan pendidikan Islam di masa awal berkembangnya Islam di nusantara, eksistensi pola pendidikan pada era penjajahan (sebelum proklamasi), kemudian peran organisasi keagamaan pada pendidikan Islam pada era penjajahan, serta pola dan kebijakan perkembangan pendidikan pasca kemerdekaan (sampai sekarang).

## **A. Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan.**

### **a. Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan ( kerajaan Islam )**

Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu: Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan.

Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat.<sup>3</sup> Didapati pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian Al Qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren dan lain-lain. Kitab-kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang.<sup>4</sup> Pendidikan Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan pendidikan barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ketujuh belas. Pada perkembangan selanjutnya pendidikan Islam mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran, metode maupun struktur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah.<sup>5</sup>

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara semaksimal, dan para muballiq ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam kapan dan dimana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Hampir di setiap desa yang ditempati kaum muslimin, mereka mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan mengerjakan shalat Jumat dan pada tiap-tiap kampung, mereka mendirikan Surau (di Sumatera Barat) atau Langgar untuk mengaji dan membaca Alquran, dan sebagai tempat untuk mendirikan shalat lima waktu.

<sup>3</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hida Agung, 1985).

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Departemen Agama. *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2005)

Pendidikan Islam yang berlangsung di langgar bersifat elementer, di mulai dengan mempelajari huruf abjad Arab (hijaiyyah) atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci Alquran

Pendidikan semacam ini dikelola oleh seorang petugas yang disebut Amil, Moden atau Lebai yang memiliki tugas ganda yaitu di samping memberikan doa pada waktu upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai guru. Pengajian Alquran pada pendidikan Langgar ini dapat dibedakan atas dua tingkatan yaitu :

1. Tingkatan rendah, yaitu merupakan tingkatan pemula, yaitu di mulai dengan sampai bisa membacanya yang diadakan pada tiap-tiap kampung.
2. Tingkatan atas, pelajarannya selain tersebut di atas, juga ditambah dengan pelajaran lagu, kasida dan berzanzi, tajwid dan mengaji kitab perukunan.

## **b. Pusat Keunggulan Pengkajian Islam Pada Tiga Kerajaan Islam di Aceh**

### **1. Zaman Kerajaan Samudra Pasai**

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah **kerajaan Samudra Pasai**, yang didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik Al-Shaleh dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Syah (tahun 1444 M/ abad ke-15 H).<sup>6</sup> Pada tahun 1345, Ibnu Batutah dari Maroko sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir, raja yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i, mengadakan pengajian sampai waktu sholat Ashar dan fasih berbahasa Arab serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana.<sup>7</sup>

Keterangan Ibnu Batutah tersebut dapat ditarik kesimpulan pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai sebagai berikut:

- a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syari'at adalah Fiqh mazhab Syafi'i
- b. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis ta'lim dan halaqoh
- c. Tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama
- d. Biaya pendidikan bersumber dari negara.

Pada zaman kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-14 M, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Mengutip keterangan Tome Pires, yang menyatakan bahwa "di Samudra Pasai banyak terdapat kota, dimana antar warga kota tersebut terdapat orang-orang

<sup>6</sup> A. Abdullah Mustofa, , Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah,( Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)hal: 54

<sup>7</sup> Zauharini, et.al., Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000, set 6) hal 135

berpendidikan”.<sup>8</sup> Menurut Ibnu Batutah juga, Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari jum’at tiba, Sultan sembahyang di Masjid menggunakan pakaian ulama, setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama, antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Ispahan. Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut Majlis Ta’lim atau halaqoh. Sistem halaqoh yaitu para murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru.

## 2. Kerajaan Perlak

Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh. Rajanya yang pertama Sultan Alaudin (tahun 1161-1186 H/abad 12 M). Antara Pasai dan Perlak terjalin kerja sama yang baik sehingga seorang Raja Pasai menikah dengan Putri Raja Perlak. Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di Pantai Selat Malaka, dan bebas dari pengaruh Hindu.<sup>9</sup>

Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Cot Kala. Dayah disamakan dengan Perguruan Tinggi, materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantiq, ilmu falaq dan filsafat. Daerahnya kira-kira dekat Aceh Timur sekarang. Pendirinya adalah ulama Pangeran Teungku Chik M.Amin, pada akhir abad ke-3 H, abad 10 M. Inilah pusat pendidikan pertama.

Rajanya yang ke enam bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243-1267 M, terkenal sebagai seorang Sultan yang arif bijaksana lagi alim. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan Perguruan Tinggi Islam yaitu suatu Majlis Taklim tinggi dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab Al-Umm karangan Imam Syafi’i.<sup>10</sup> Dengan demikian pada kerajaan Perlak ini proses pendidikan Islam telah berjalan cukup baik.

## 3. Kerajaan Aceh Darussalam

Proklamasi kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan Barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan Timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Syah diangkat menjadi Raja dengan Sultan Alaudin Ali Mughayat Syah (1507-1522 M). Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan

<sup>8</sup> Ibrahim, M, et.al., Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta : CV. Tumaritis, 1991), cet 2 hal 61

<sup>9</sup> Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. 4 hal 29

<sup>10</sup> A. Abdullah Mustofa, , Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah,( Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)hal: 54

pemerintahan Kerajaan Aceh adalah Gampong (Kampung), yang dikepalai oleh seorang Keucik dan Waki (wakil). Gampong-gampong yang letaknya berdekatan dan yang penduduknya melakukan ibadah bersama pada hari jum'at di sebuah masjid merupakan suatu kekuasaan wilayah yang disebut mukim, yang memegang peranan pimpinan mukim disebut Imeum mukim.<sup>11</sup>

Jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah Meunasah (Madrasah). Yang berarti tempat belajar atau sekolah, terdapat di setiap gampong dan mempunyai multi fungsi antara lain:

1. Sebagai tempat belajar Alquran
2. Sebagai Sekolah Dasar, dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, Ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam.

Fungsi lainnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu.
2. Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Alquran di bulan puasa.
3. Tempat kenduri Maulud pada bulan Mauludan.
4. Tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idhul Fitri / bulan puasa
5. Tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung.
6. Tempat bermusyawarah dalam segala urusan
7. Letak meunasah harus berbeda dengan letak rumah, supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah atau meunasah dan mengetahui arah kiblat sholat.<sup>12</sup>

Kerajaan Aceh telah menjalin suatu hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka di Timur Tengah yaitu kerajaan Turki. Pada masa itu banyak pula ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh. Para ulama dan pujangga ini mengajarkan ilmu agama Islam (Theologi Islam) dan berbagai ilmu pengetahuan serta menulis bermacam-macam kitab berisi ajaran agama. Karenanya pengajaran agama Islam di Aceh menjadi penting dan Aceh menjadi kerajaan Islam yang kuat di nusantara. Diantara para ulama dan pijangga yang pernah datang ke kerajaan Aceh antara lain Muhammad Azhari yang mengajar ilmu Metafisika, Syekh Abdul Khair Ibn Syekh Hajar ahli dalam bidang pogmatic dan mistik, Muhammad Yamani ahli

---

<sup>11</sup> Ibrahim, M, et.al., Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta : CV. Tumaritis, 1991), cet 2 hal 75

<sup>12</sup> Ibrahim, M, et.al., Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta : CV. Tumaritis, 1991), cet 2 hal 76

dalam bidang ilmu usul fiqh dan Syekh Muhammad Jailani Ibn Hasan yang mengajar logika.<sup>13</sup>

Tokoh pendidikan agama Islam lainnya yang berada di kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang beraliran wujudiyah. Diantara karya-karya Hamzah Fansuri adalah *Asrar Al-Aufin*, *Syarab Al-Asyikin*, dan *Zuiat Al-Nuwahidin*. Sebagai seorang pujangga ia menghasilkan karya-karya, Syair si burung pungguk, syair perahu. Ulama penting lainnya adalah Syamsuddin As-Samathrani atau lebih dikenal dengan Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri yang mengembangkan paham wujudiyah di Aceh. Kitab yang ditulis, *Mir'atul al-Qulub*, *Miratul Mukmin* dan lainnya.

Ulama dan pujangga lain yang pernah datang ke kerajaan Aceh ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ia menentang paham wujudiyah dan menulis banyak kitab mengenai agama Islam dalam bahasa Arab maupun Melayu klasik. Kitab yang terbesar dan tertinggi mutu dalam kesustraan Melayu klasik dan berisi tentang sejarah kerajaan Aceh adalah kitab *Bustanul Salatin*. Pada masa kejayaan kerajaan Aceh, masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) oleh Sultannya banyak didirikan masjid sebagai tempat beribadah umat Islam, salah satu masjid yang terkenal Masjid Baitul Rahman, yang juga dijadikan sebagai Perguruan Tinggi dan mempunyai 17 daras (fakultas).

Dengan melihat banyak para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh, serta adanya Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Aceh menjadi pusat studi Islam. Karena faktor agama Islam merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh pada periode berikutnya. Menurut B.J. Boland, bahwa seorang Aceh adalah seorang Islam.<sup>14</sup>

#### **d. Pusat Keunggulan Pengkajian Islam pada kerajaan di Jawa**

##### **1. Zaman Kerajaan Demak**

Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi (Brawijaya V) dengan ditandai candrasengkala, *sirna ilang kertaning bumi* (artinya tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi). Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar *Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama*. Raden Patah adalah putra Brawijaya V dengan putri dari Campa. Setelah takhta ayahnya jatuh ke tangan Girindra Wardhana dari *Keling* (Daha), Demak pun terancam. Akibatnya terjadi peperangan antara Demak dan Majapahit pimpinan Girindra Wardhana dan keturunannya yang bernama Prabu Udara hingga tahun 1518.

---

<sup>13</sup> Ibid: hal 88

<sup>14</sup> Ibid: hal 89

Kemenangan berada di pihak Demak dan tampil sebagai Kerajaan Islam terbesar di Jawa.<sup>15</sup>

### a. Pendidikan Islam di Kerajaan Demak

Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai **kemiripan** dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Disana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang Badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam.<sup>16</sup> Kitab keluaran Demak adalah Usul 6 Bis, yaitu kitab yang ditulis tangan berisi 6 kitab dengan 6 *Bismillahirrahmanirrahim*, karangan ulama Sarkandi. Isinya tentang dasar-dasar ilmu agama Islam. Kitab lainnya adalah Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin dan Jalaluddin as Suyuthi. Adapula kitab agama Islam yang hingga kini masih dikenal, yaitu Primbon, berisi catatan tentang ilmu-ilmu agama, macam-macam doa, obat-obatan, ilmu gaib, bahkan wejangan para wali. Selain itu, dikenal pula kitab-kitab yang dikenal dengan nama Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijaga, Wasita Jati Sunan Geseng dan lain-lain. Dimana seluruh kitab tersebut berbentuk diktat dan ditulis tangan. Terlepas dari kitab-kitab agama di zaman Demak yang terbilang sedikit, dalam kenyataannya agama Islam berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan pesatnya. Hal ini dikarenakan peranan para Sunan dan Kyai dalam melaksanakan pendidikan dan penyiaran Islam mengikuti sistem yang telah diajarkan nabi. Selain itu, dengan memberikan suri tauladan yang baik dalam perangai dan perbuatan nyata. Ada hubungan khusus yang terjalin antara Kerajaan Demak dan Walisongo, dimana peranan walisongo di bidang dakwah sangatlah besar.

## 2. Kerajaan Mataram

Perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang (sekitar tahun 1568), tidak menyebabkan perubahan yang berarti pada sistem pendidikan dan pengajaran Islam. Baru kemudian setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram di tahun 1586, tampak beberapa macam perubahan, terutama pada zaman Sultan Agung (tahun 1613). Sesudah mempersatukan hampir seluruh daerah di Jawa dengan Mataram, sejak tahun 1630 Sultan Agung mencurahkan tenaganya untuk membangun negara, seperti mempergiat usaha-usaha pertanian serta memajukan perdagangan dengan luar negeri. Di zaman beliau, aspek kebudayaan, kesenian dan kesusastraan telah mengalami kemajuan.

Selain itu, Sultan Agung memerintahkan di tiap ibukota kabupaten didirikan sebuah masjid besar, sebagai induk dari seluruh masjid dalam kabupaten tersebut dan pada tiap ibukota distrik sebuah mesjid Kawedanan. Begitu pula di desa juga didirikan masjid desa. Masjid besar dikepalai oleh seorang *penghulu* dan dibantu

<sup>15</sup> Drs. Shodiq Mustafa, *Wawasan Sejarah Indonesia dan Dunia* (Tiga Serangkai, Solo, 2007) hlm. 118

<sup>16</sup> Drs. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Lintasan Sejarah Pertumbuhan & Perkembangan (Rajawali Press, Jakarta, 1995) 34

oleh 40 orang pegawainya. Masjid Kawedanan dipimpin oleh naib, dan dibantu 11 pegawainya. Sedang masjid desa dikepalai oleh *modin* (kayim, kaum) dengan 4 orang pembantunya. Penghulu adalah kepala urusan penyelenggaraan Islam di seluruh daerah kabupaten. Pegawai penghulu sendiri dibagi menjadi 4 golongan (bendahara, ketib/khatib, modin/muadzin, merbot). Wilayah suatu daerah dibagi atas beberapa bagian sebagai usaha untuk memajukan pendidikan dan pengajaran Islam. Pelaksanaannya di tiap-tiap bagian dipercayakan kepada beberapa orang Ketib dan dibantu oleh beberapa orang modin<sup>17</sup>

#### a. Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram

Beberapa tempat Pengajian Qur'an diadakan di desa-desa. Di sana diajarkan huruf hijaiyah, membaca al Qur'an, pokok-pokok dan dasar ilmu agama Islam. Cara mengajarkannya adalah dengan menghafal. Jumlah tempat Pengajian Qur'an adalah menurut banyaknya *modin* di desa itu. Hal itu disebabkan di tiap Pengajian Qur'an, modin bertindak sebagai pengajar. Meskipun tidak ada undang-undang wajib belajar, namun anak laki-laki dan perempuan yang berumur 7 tahun harus belajar di Pengajaran Qur'an di desa masing-masing atas kehendak orang tuanya sendiri. Hal tersebut menjadi semacam adat yang berlaku saat itu. Karena jika ada anak yang berumur 7 tahun atau lebih tidak belajar mengaji, dengan sendirinya menjadi olok-olokan teman seusianya.

Selain itu ada pula Pengajian Kitab yang dikhususkan pada murid-murid yang telah mengkhathamkan al Qur'an. Guru di Pengajian Kitab biasanya adalah modin terampil di desa itu. Bisa juga modin dari desa lain yang memenuhi syarat, baik dari kepandaiaan maupun budi pekertinya. Guru-guru tersebut diberi gelar Kiyai Anom. Waktu belajar ialah pagi, siang, dan malam hari. Kitab-kitab yang diajarkan ditulis dalam bahasa arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Pelajarannya antara lain Usul 6 Bis, kemudian matan Taqrib, dan Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali dalam ilmu akhlak. Pengajarannya dilakukan dengan sorongan, seorang demi seorang bagi murid pemula dan halaqah bagi pelajar lanjutan.<sup>18</sup> Di beberapa kabupaten, diadakan Pesantren Besar, lengkap dengan asrama atau pondok untuk melanjutkan pendidikan dari pesantren desa ke tingkatan tinggi. Gurunya bergelar Kiyai Sepuh atau Kanjeng Kiyai. Pesantren ini berperan sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren besar ialah kitab-kitab besar dalam bahasa arab, lalu diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Berbagai macam ilmu agama diajarkan disini, seperti: fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Selain pesantren besar, juga diselenggarakan semacam pesantren takhassus, yang mengajarkan satu cabang ilmu agama dengan cara mendalam atau spesialisasi.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Prof.H. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*(Penerbit Mutiara, Jakarta, 1995)hlm.223

<sup>18</sup> Sistem ini dipakai secara umum di seluruh Indonesia, sebelum zaman modernisasi madrasah-madrasah

<sup>19</sup> Drs.Hasbullah, *Sejarah Pendidikan*.,hlm.37

## b. Pendidikan berdasarkan kepentingan penjajahan (era kolonialisme Belanda dan Jepang)

### 1. Pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta.<sup>20</sup> Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik dan agama. Tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Selanjutnya pada tahun 1932 M keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinya atau memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah.<sup>21</sup> Tekanan yang diberikan pihak penjajah justru tidak dihiraukan terbukti dalam sejarah masyarakat muslim Indonesia pada saat itu organisasi Islam laksana air hujan yang sulit dibendung.

Kedatangan bangsa barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya. Bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula dibidang pendidikan. Mereka memperkenalkan system dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaruan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia selama 3.5 Abad.<sup>22</sup>

Sejak dari zaman VOC (Belanda Swasta) kedatangan mereka di Indonesia. Dalam hak actroi VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi sebagai berikut : "Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah".<sup>23</sup>

Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Dan di tiap daerah Keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. *Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut : "Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara".*<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Zuhairini, ibid, h. 148. Bandingkan dengan Hanun Asroah, *op cit*, h.150

<sup>21</sup> Ibid hal 148-150

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> <http://anshori-pecintagadis.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html>

<sup>24</sup> <http://lena-unindrabioza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-zaman-enjajahan.html>

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan menurun kualitasnya dibandingkan masa sebelumnya (Kerajaan Islam) Belanda sebagai penjajah pada masa itu tidak memperdulikan perkembangan pendidikan di Indonesia terutama Islam karena Belanda sendiri menganut agama nashroni dan bahkan Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. Ini sangat wajar karena, kolonial Belanda tidak akan bertahan lama, apabila agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menghadapi masalah tersebut pemerintah kolonial Belanda sangat berterima kasih kepada Christian Snouck Hurgronje (1889) yang secara sungguh-sungguh mendalami Islam. Salah satu nasehatnya kepada pemerintah Belanda ialah “Pengaruh Islam tidak mungkin dihambat tetapi perlu dibatasi pengaruhnya. Berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi *pendidikan* harus diawasi”.<sup>25</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia berhasil dijadikan bangsa yang sangat lemah dalam segala sektor kehidupan. Penduduk yang berpendidikan jumlahnya sangat sedikit. Pendidikan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Penduduk pribumi umumnya tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

## 2. Kebijakan kolonialisme belanda terhadap pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan *karena* kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat pedagogis cultural tetapi juga psikologis politis. Pandangan ini pada satu pihak menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam upaya mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Tetapi dipihak lain, pandangan diatas juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah.

Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah penjajah Belanda. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-19 Snouck Hurgronje telah begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama ini dinilai sebagai beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi.

<sup>25</sup> <http://anshori.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html>

Agaknya ramalan tersebut belum memperhitungkan faktor kemampuan Islam untuk mempertahankan diri di negeri ini, juga belum memperhitungkan faktor kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Memang cukup alasan agaknya untuk merasa optimis. Kondisi obyektif pendidikan Islam pada waktu itu memang sedemikian rupa, sehingga diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas Barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang, dan tidak akan bisa berhadapan dengan sikap diskriminatif pemerintah penjajah. Tetapi ternyata kemudian kondisi agama ini berkembang menjadi berbeda dengan perhitungan dan ramalan tersebut.

Kesadaran bahwa pemerintahan penjajah merupakan “*pemerintahan kafir*” yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam di benak para santri.<sup>26</sup> Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda, dinilainya sebagai uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram, karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda. Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah penjajah ini, terlihat pula pada letak pesantren di Jawa pada waktu itu, yang pada umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tapi di pinggir atau bahkan di luar keduanya.

Ada dua ciri khas pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. *Pertama*, adalah *dikotomis* yaitu suatu keadaan/sikap saling bertentangan. *Kedua*, adalah *diskriminatif* dimana setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama yang pada akhirnya mendapat reaksi keras dari umat Islam.

#### a) *Dikotomis.*

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pertentangan antara pendidikan Belanda (HIS, MULO, AMS, dan lain-lain), dengan pendidikan Islam (Pesantren, dayah, surau). Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum (ilmu-ilmu sekuler). Pemerintah penjajah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh.

Pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, ini dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (Indische Staatsregeling) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.

Upaya-upaya untuk memasukan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum telah beberapa kali diusulkan lewat Volksraad, tetapi tetap ditolak oleh

---

<sup>26</sup> Khaeruddin. 2004. *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. CV. Berkah Utami

pemerintah Belanda. Dan hal ini berlangsung sampai akhir pemerintahan Belanda di Indonesia.

Sedangkan di lembaga pendidikan Islam dalam hal ini di pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian *suasana pendidikan dikotomis* itu amat kentara di zaman penjajahan Belanda.

Berkaitan dengan itu kedua lembaga pendidikan ini (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan output yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Pada waktu itu perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, serta dilanjutkan dan diperkuat pada abad ke-20.

#### *b) Diskriminatif*

Pemerintah Belanda memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Diantara pelaksanaan diskriminatif diberlakukan ordonansi guru pada tahun 1905. Ordonansi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama.

Ordonansi ini dirasakan oleh para guru agama sangat berat, terlebih-lebih bagi guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah. Selain itu dampak negative yang dihasilkan dari ordonansi ini adalah dapat digunakan untuk menekan Islam yang dikuatkan dengan alasan stabilitas keamanan.

Perkembangan berikutnya adalah pada tahun 1905 tersebut akhirnya dicabut, karena dianggap tidak relevan lagi, dan diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru-guru agama untuk memberitahu bukan meminta izin.

Selain Ordonansi Guru pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolahpun harus diberikan secara berkala. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan dikalangan masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang masih belum tertata, Ordonansi itu dengan sendirinya menjadi faktor penghambat. Reaksi negatif terhadap Ordonansi Sekolah Liar ini juga datang dari para penyelenggara pendidikan diluar gerakan Islam.

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu dapat dikelompokkan dalam dua corak : (1) defensif dan (2) progresif. Corak defensif ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia Belanda itu terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem

pendidikan tradisional pesantren yang sepenuhnya mengambil jarak dengan pemerintah penjajah. Disamping mengambil lokasi di daerah-daerah terpencil, pesantren juga mengembangkan kurikulum tersendiri yang hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Pesantren dalam hal ini memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang menjadi benteng pertahanan umat atas penetrasi penjajah, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan posisi defensif ini, pesantren pada kenyataannya memang bebas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda, meskipun dengan resiko harus terasing dari perkembangan masyarakat modern.

Corak responsi umat Islam juga bersifat progresif, yang memandang bahwa tekanan pemerintah Hindia Belanda itu merupakan kebijaksanaan diskriminatif. Usaha umat Islam dalam bidang pendidikan dengan demikian adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari sudut kelembagaan maupun kurikulum. Ketergantungan pada tekanan penjajah justru akan melemahkan posisi umat Islam sendiri. Begitupun sebaliknya, membiarkan sikap defensif terus menerus, akan semakin memberi ruang yang lapang bagi gerakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak tercerabut dari akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan berkembangnya sekolah Islam atau madrasah diberbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Terlepas dari kedua responsi diatas, umat Islam pada umumnya menolak segala bentuk ordonansi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Umat Islam menyatakan keberatan terhadap ordonansi sehingga mereka membuat reaksi yang cukup keras.

Dibawah pengawasan dan ordonansi yang ketat oleh pemerintah Hindia Belanda, madrasah mulai tumbuh. Terdapat beberapa madrasah yang memperoleh pengakuan pemerintah meskipun masih merupakan pengakuan yang setengah-setengah. Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu berdiri semata-mata karena kreasi tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah. Kebutuhan sebagian rakyat untuk mengenyam pendidikan akhirnya terpenuhi melalui madrasah, sementara pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan dalam sekolah-sekolah yang didirikannya sebagai wujud dari kebijaksanaan diskriminatifnya.

#### **b. Peranan Organisasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam sebelum Kemerdekaan**

Munculnya organisasi Islam pertama kali di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melaksanakan ajaran Islam dan mencerdaskan bangsa. Salah satu program yang dijalankan oleh setiap organisasi Islam yaitu pada bidang pendidikan. Beberapa organisasi Islam di masa penjajahan yaitu:

### 1. Jamiatul Khair

Al-Jamiatul Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 yang beranggotakan mayoritas kalangan Arab. Program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan namun program ini memiliki hambatan karena kekurangan dan kemunduran kekhilafahan.<sup>27</sup> Tampilnya Jamiatul Khair sebagai organisasi kegamaan berorientasi pada pembaharuan pendidikan Islam terasa sangat penting karena organisasi ini merupakan organisasi modern dalam masyarakat Islam. Kemoderenan organisasi ini terlihat dalam anggaran dasar mata pelajaran yang diajarkan bersifat umum, keseluruhan kegiatannya didasarkan pada sistem barat.

### 2. Al Irsyad

Al-Irsyad adalah pecahan dari Jamiatul Khair. Al Irsyad mempunyai tujuan utama yaitu pertama merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda dan bahasa lainnya. Kedua membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan sekolah dan unit percetakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Al Irsyad adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Pada tahun 1913 didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas materi pelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum di samping pelajaran agama. Sekolah Al-Irsyad mempunyai cabang dan semuanya berada di tingkat dasar.

### 3. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 H oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupan dan praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam.

Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar samapai perguruan tinggi. Muhammadiyah memulai pendirian sekolah dasar pada tahun 1915 di mana pada sekolah tersebut diajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pada tahun 1929, Muhammadiyah telah menerbitkan 700.000 buah buku dan brosur. Pada tahun 1938 telah memiliki 31 perpustakaan umum dan 1774 sekolah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Asrohah Hanun, 1992. *Sejarah Pendidikan Islam* Cet : 1; Logos Wacana Ilmu, Jakarta. Hal:160

<sup>28</sup> Noer, Delian., 1991., *Gerakan Modern Islam di Indonesia.*, LP3ES., jakarta. h.95

#### 4. Persis

Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, PERSIS mempunyai ciri khas tersendiri di mana organisasi ini di samping pendidikan juga dititikberatkan pada pembentukan faham keIslaman. Perhatian PERSIS terutama dalam menyebarkan cita-cita dan pikirannya, ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama tokoh-tokoh PERSIS, melakukan khotbah-khotbah, membentuk kelompok studi, mendirikan sekolah-sekolah, menerbitkan dan menyebarkan majalah dan kitab.<sup>29</sup>

#### 5. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 13 Januari 1926 yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, sebagai perluasan dari komite hijaz yang dibangun untuk dua maksud yaitu pertama untuk mengimbangi komite khilafah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharu. Kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ad penguasa baru di tanah Arab agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.

Pada awalnya, organisasi ini tidak mempunyai rencana yang jelas kecuali yang bersangkutan dengan masalah pergantian kekuasaan di Hijaz. Tahun 1927 baru tujuan organisasi dirumuskan, di mana organisasi ini memperkuat dan memformulasikan salah satu Madzhab (empat madzhab) untuk melakukan kegiatan yang umumnya berdasarkan ajaran Islam. Kegiatan ini meliputi usaha untuk memperkuat persatuan di kalangan ulama yang berpegang teguh pada Madzhab, pengawasan terhadap pemakaian kitab-kitab di pesantren serta penyebaran agama Islam. Nahdatul Ulama memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan, khususnya pendidikan tradisional yang harus dipertahankan keberadaannya. Pada awal berdirinya, NU tidak membicarakan secara tegas tentang pembaharuan pendidikan namun demikian NU juga pada dasarnya dalam pembaharuan pendidikan.

#### c. Pendidikan Islam di masa Pendudukan Jepang

Pendidikan Islam zaman penjajahan jepang dimulai pada tahun 1942-1945, sebab bukan hanya belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Dalam perang pasifik (perang dunia ke II), jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942 berhasil merebut indonesia dari kekuasaan belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial belanda menyerah tanpa sayarat kepada sekutu.<sup>30</sup> Penjajahan jepang di indonesia mempunyai konsep hokko ichiu

<sup>29</sup> Asrohah Hanun, 1992. *Sejarah Pendidikan Islam* Cet : 1; Logos Wacana Ilmu, Jakarta. hal 167

<sup>30</sup> Suwendi, *sejarah dan pemikiran pendidikan islam* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), 85

(kemakmuran bersama asia raya) dengan semboyan *Asia untuk Asia*.<sup>31</sup> Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama asia timur raya pada tahun 1940. Jepang akan menjadi pusat lingkungan pengaruh atas delapan daerah yakni: Manchuria, daratan Cina, kepulauan Muangtai, Malaysia, Indonesia, dan Asia Rusia. Lingkungan kemakmuran ini disebut dengan *Hakko Ichi-U* (delapan belah dibawah satu atap).

Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda
2. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain:

1. Mengubah *Kantoor Voor Islamistische Zaken* pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi *Sumubi* yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari.
2. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang;
3. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin.
4. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.
5. Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan
6. Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro

---

<sup>31</sup> Redja mudiyaharjo, *pengantar pendidikan* (jakarta : PT Grafindo Persada, 2001 ), 267

Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU.<sup>32</sup>

Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bagkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.<sup>33</sup>

Di sini beberapa tujuan pendidikan Islam ketika zaman penjajahan antara lain:

- a. Azas tujuan Muhammadiyah: mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan azas perjuangan dakwah Islamiyyah dan amar ma'ruf nahi Munkar
- b. INS (Indonesische Nadelanshe School) dipelopori oleh Muhammad Syafi'i (1899-1969) bertujuan mendidik anak untuk berpikir rasional, mendidik anak agar bekerja sungguh-sungguh, membentuk manusia yang berwatak dan menanam persatuan.
- c. Tujuan Nahdlatul Ulama', sebelum menjadi partai politik mengang teguh mazhab empat, disamping mejadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Suwendi, *sejarah dan pemikiran pendidikan islam* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), 87

<sup>33</sup> <http://lena-unindrabioza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-zaman-penjajahan.html>

<sup>34</sup> <http://anshori.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html>

## **B. Sistem Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan.**

### **1. Sistem Pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran keagamaan (kerajaan Islam )**

Pada dasarnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dan perkembangan di Indonesia sejalan dengan di awalnya sistem pembentukan masyarakat muslim tentunya dengan proses yang panjang. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubaligh dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid, yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan, majlis ta,lim, surau, Meunasah, Rangkang dan Dayah. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah pengajian Alquran, serta ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang.

Di masa awal penyebaran Islam Sistem Pendidikan pada masa itu masih bersifat informal yang mana di masa itu dikelola oleh seorang petugas yang disebut Amil, Moden atau Lebai yang memiliki tugas ganda yaitu di samping memberikan doa pada waktu upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai guru. Sistem Pendidikan yang terdapat dalam pola Pengajian Alquran serta pengkajian kitab pada ini dapat dibedakan atas dua tingkatan yaitu :

- 1) Tingkatan rendah, yaitu merupakan tingkatan pemula, yaitu di mulai dengan sampai bisa membacanya yang diadakan pada tiap-tiap kampung
- 2) Tingkatan atas, pelajarannya selain tersebut di atas, juga ditambah dengan pelajaran lagu, kasida dan berzanzi, tajwid dan mengaji kitab perukunan

Sedangkan Di masa kerajaan Samudera Pasai sistem pendidikan Islam telah berkembang dengan diadakanya sistem kelembagaan untuk para pelajar (sekolah), selanjutnya Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam, system diskusi dengan para alim ulama setiap hari jum'at dengan menggunakan system halaqoh.

Di perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan Islam mulai menunjukkan keberhasilannya dengan didirikannya sebuah Lembaga Perguruan Tinggi (Universitas) yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut mengajarkan dan mengkaji kitab-kitab agama yang berbobot tinggi. Dengan sistem pendidikan seperti ini Dayah cot kala menjadi pusat pendidikan saat itu dan berjalan dengan baik.

Di masa selanjutnya, Kerajaan Aceh telah membuka sistem pendidikan Islam yang luar biasa dengan menciptakan sistem pendidikan meunasah (Madrasah)

dengan berbagai multi fungsi. Selain itu juga kerajaan aceh dalam bidang pendidikan telah menjalin kerjasama dengan Negara Turki guna mencari para ulama dan pujangga dalam mengajarkan ilmu teologi di kerajaan aceh.

Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Disana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang Badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam.<sup>35</sup> Kitab keluaran Demak adalah Usul 6 Bis, yaitu kitab yang ditulis tangan berisi 6 kitab dengan 6 *Bismillahirrahmanirrahim*, karangan ulama Sarkandi. Isinya tentang dasar-dasar ilmu agama Islam. Kitab lainnya adalah Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin dan Jalaluddin as Suyuthi. Adapula kitab agama Islam yang hingga kini masih dikenal, yaitu Primbon, berisi catatan tentang ilmu-ilmu agama, macam-macam doa, obat-obatan, ilmu gaib, bahkan wejangan para wali. Selain itu, dikenal pula kitab-kitab yang dikenal dengan nama Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijaga, Wasita Jati Sunan Geseng dan lain-lain. Dimana seluruh kitab tersebut berbentuk diktat dan ditulis tangan. Terlepas dari kitab-kitab agama di zaman Demak yang terbilang sedikit, dalam kenyataannya agama Islam berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan pesatnya. Hal ini dikarenakan peranan para Sunan dan Kyai dalam melaksanakan pendidikan dan penyiaran Islam mengikuti sistem yang telah diajarkan nabi. Selain itu, dengan memberikan suri tauladan yang baik dalam perangai dan perbuatan nyata. Adanya kebijaksanaan para wali menyiarkan agama dan memasukkan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional membuat agama Islam dapat tersebar ke seluruh kepulauan Indonesia.

Di kerajaan Mataram sendiri sistem pendidikan yang dilaksanakan pada saat itu masih bersifat informal di sebabkan karena tempat proses belajar mengajar masih diadakan di desa-desa, kemudian belum ada kebijakan khusus dari kesultanan tentang hukum dan undang-undang pendidikan, serta pengajaran yang di berikan hanya sekitar kajian al-quran serta ilmu dasar agama Islam dengan sistem belajar menghafal. Jumlah tempat Pengajian Qur'an adalah menurut banyaknya *modin* di desa itu. Hal itu disebabkan di tiap Pengajian Qur'an, *modin* bertindak sebagai pengajar. Meskipun tidak ada undang-undang wajib belajar, namun anak laki-laki dan perempuan yang berumur 7 tahun harus belajar di Pengajian Qur'an di desa masing-masing atas kehendak orang tuanya sendiri. Hal tersebut menjadi semacam adat yang berlaku saat itu. Karena jika ada anak yang berumur 7 tahun atau lebih tidak belajar mengaji, dengan sendirinya menjadi olok-olokan teman seusianya.

Selain itu ada pula Pengajian Kitab yang dikhususkan pada murid-murid yang telah mengkhhatamkan al Qur'an. Guru di Pengajian Kitab biasanya adalah *modin* terpandai di desa itu. Bisa juga *modin* dari desa lain yang memenuhi

---

<sup>35</sup> Drs. Shodiq Mustafa, *Wawasan Sejarah Indonesia dan Dunia*( Tiga Serangkai, Solo, 2007)hlm. 118

syarat, baik dari kepandaiaan maupun budi pekertinya. Guru-guru tersebut diberi gelar Kiyai Anom. Waktu belajar ialah pagi, siang, dan malam hari. Pengajarannya dilakukan dengan sorongan, seorang demi seorang bagi murid pemula dan halaqah bagi pelajar lanjutan.<sup>36</sup> Di beberapa kabupaten, diadakan Pesantren Besar, lengkap dengan asrama atau pondok untuk melanjutkan pendidikan dari pesantren desa ke tingkatan tinggi. Gurunya bergelar Kiyai Sepuh atau Kanjeng Kiyai. Pesantren ini berperan sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren besar ialah kitab-kitab besar dalam bahasa arab, lalu diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Berbagai macam ilmu agama diajarkan disini, seperti: fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Selain pesantren besar, juga diselenggarakan semacam pesantren takhassus, yang mengajarkan satu cabang ilmu agama dengan cara mendalam atau spesialisasi.

## 2. Sistem Pendidikan Islam di masa kolonialisme belanda dan Jepang

Sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme tidak berkembang pesat atau mengalami kemunduran. Ini semua disebabkan karena kepentingan pihak penjajah yang takut akan menjadi boomerang bagi dirinya sendiri, mengingat Islam sangat melarang sistem penjajahan dengan bentuk apapun.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat pedagogis cultural tetapi juga psikologis politis.

Dalam sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme barat, penjajah belanda telah memberikan kebijakan yang sangat merugikan pihak kaum muslimin yaitu ordonansi, dimana penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah, sekolah-sekolah liar yang harus meminta izin terlebih dahulu atas terselenggaranya pendidikan tersebut, Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolahpun harus diberikan secara berkala. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan dikalangan masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang masih belum tertata, Ordonansi itu dengan sendirinya menjadi faktor penghambat.

Di saat itu pihak Islam mengalami masa di khotomis dan diskrimantif. Sebagaimana kebijakan pemerintah belanda saat itu dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (Indishe Staatsregeling) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.

Akibat dari ordonansi tersebut menimbulkan reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Adapun reaksi umat Islam saat

<sup>36</sup> Sistem ini dipakai secara umum di seluruh Indonesia, sebelum zaman modernisasi

itu dapat dikelompokkan dalam dua corak : (1) defensif dan (2) progresif. Corak defensif ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia Belanda itu terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan tradisional pesantren yang sepenuhnya mengambil jarak dengan pemerintah penjajah. Disamping mengambil lokasi di daerah-daerah terpencil, pesantren juga mengembangkan kurikulum tersendiri yang hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Pesantren dalam hal ini memosisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang menjadi benteng pertahanan umat atas penetrasi penjajah, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan posisi defensif ini, pesantren pada kenyataannya memang bebas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda, meskipun dengan resiko harus terasing dari perkembangan masyarakat modern.

Corak responsi umat Islam juga bersifat progresif, yang memandang bahwa tekanan pemerintah Hindia Belanda itu merupakan kebijaksanaan diskriminatif. Usaha umat Islam dalam bidang pendidikan dengan demikian adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari sudut kelembagaan maupun kurikulum. Ketergantungan pada tekanan penjajah justru akan melemahkan posisi umat Islam sendiri. Begitupun sebaliknya, membiarkan sikap defensif terus menerus, akan semakin memberi ruang yang lapang bagi gerakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak tercerabut dari akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan berkembangnya sekolah Islam atau madrasah diberbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman jepang umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.<sup>37</sup>

### **C. Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan.**

Pada tahap awal pendidikan Islam itu berlangsung secara informal. Para Muballigh banyak memberikan contoh teladan dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Para Muballigh itu menunjukkan akhlaqul karimah, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontoh

<sup>37</sup> <http://lena-unindrabioza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-zaman-penjajahan.html>

perilaku mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, terbentuklah komunitas-komunitas Islam, yang tersebar di berbagai daerah yang selanjutnya disimbolkan dengan membangun masjid. Ulama dan guru-guru mulai berdatangan, pengajian-pengajian diselenggarakan dengan mengambil tempat di masjid-masjid. Tempat-tempat pengajian ini kemudian selanjutnya ada yang berkembang menjadi pondok pesantren, surau, langgar, bahkan sekolah hingga perguruan tinggi. Berikut ini adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tengah berkembang sebagai wadah terselenggaranya pendidikan Islam di saat itu :

#### **a) Surau**

Istilah surau di minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam system minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berpungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil baligh dan orang tua yang uzur. Fungsi surau ini semakin kuat karna struktur masyarakat minangkabau yang menganut system matrilineal. Menurut ketentuan bahwa laki-laki tak punya kamar dirumah orang tuanya, sehingga mereka diharuskan untuk tidur disurau. Kenyataan ini menyebabkan surau menjadi tempat penting pendewasaan generasi Minangkabau, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan lainnya.

Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali syekh Burhanuddin sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam khususnya tarekat (suluk). Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan system pendidikan halaqoh. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih di seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-quran. Di samping ilmu-ilmu keIslaman lainnya. Seperti keIslaman, akhlak dan ibadah, pada umumnya pendidikan ini dilaksanakan pada malam hari. Secara bertahap, eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami kemajuan.

#### **b) Meunasah**

Meunasah merupakan pendidikan Islam terendah. Meunasah berasal dari kata Arab madrasah. Meunasah merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa. Bangunan ini seperti rumah, tetapi tidak mempunyai jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Meunasah secara fisik adalah, bangunan rumah panggung yang di buat pada setiap kampung. Dan di antara fungsi meunasah adalah:

1. Sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat dan tempat penyalurannya, tempat musyawarah dan sebagainya,

2. Sebagai lembaga pendidikan Islam dimana diajarkan pelajaran membaca Al-quran. Pengajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah satu bulan sekali.

Dalam perkembangan lebih lanjut, meunasah bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan juga sebagai tempat jual beli barang-barang yang tak bergerak. Lama pendidikan di meunasah tidak ada batasan tertentu. Umumnya pendidikan berlangsung selama dua sampai sepuluh tahun. pengajaran biasanya berlangsung malam hari, biasanya pelajaran diawali dengan mengajarkan huruf hijaiyah dengan metode mengenal huruf kemudian merangkai huruf. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca juz amma, sambil menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian baru ditingkatkan dengan membaca Al-quran besar di lengkapi dengan tajwidnya.

Belajar di meunasah tidak di pungut bayaran, karena mengajar dianggap ibadah. keberadaan meunasah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh, semua orang tua memasukkan anaknya ke meunasah. Dengan kata lain meunasah merupakan madrasah wajib belajar bagi masyarakat Aceh masa lalu. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila orang Aceh mempunyai fanatisme agama yang tinggi.

### c) MADRASAH

Kalau dicermati istilah madrasah dari aspek derivasi kata, maka madrasah merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti belajar. Jadi, madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa (umat Islam). Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari madrasah tersebut memegang peran penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam banyak menarik perhatian berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional. hal itu disebabkan karena jumlah peserta didiknya yang signifikan, akan tetapi juga karena karakteristiknya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Sejarah **dan berkembangnya madrasah** akan dibagi dalam dua periode, yaitu:

#### 1) Periode sebelum kemerdekaan

Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian Al-quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah surau, masjid, pesantren dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran, metode maupun struktur organisasinya, sehingga melahirkan suatu bentuk baru yang disebut madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan

mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

## **2) Periode sesudah kemerdekaan**

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah departement agama yang akan mengurus masalah keberagaman di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Sungguh pun pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah, namun pendidikan Islam masih tersisih dari sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya SKB 3 menteri tanggal 24 maret 1975, yang berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan nasional.

### **d) PESANTREN**

Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga keberadaannya di tengah masyarakat tidaklah terasa asing. Dalam waktu yang sama segala aktifitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya. Dari perspektif kependidikan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga kependidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi. Sejak dilancarkan perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai dunia Islam, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan.

Di sisi lain, ciri-ciri pesantren berikut unsur-unsur kelembagaannya tidak bisa dipisahkan dari sistem kultural dan tidak dapat pula diletakkan pada semua pesantren secara uniformitas karena setiap pesantren mempunyai keunikannya masing-masing. Tetapi pesantren secara umum memiliki karakteristik pesantren itu dari segi:

#### **a. Materi pelajaran dan metode pengajaran**

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan agama. Sedangkan kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab (kitab tafsirnya kuning). Pelajaran agama yang dikaji di pesantren ialah Al-quran dengan tajwid dan, aqa'id dan ilmu kalam, fikih dan usul fikih, tarikh, tasawuf dan sebagainya.

#### **b. Jenjang pendidikan**

Jenjang pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi seperti dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal. Umumnya kenaikan tingkat seorang santri ditandai dengan tamat dan bergantinya kitab yang dipelajari.

#### D. Kurikulum dan Materi Pendidikan Islam di masa Sebelum Kemerdekaan.

Kurikulum serta materi Pendidikan Islam di saat masuknya Islam ke Indonesia hingga Sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik saat itu, hingga mengakibatkan sistem kurikulum dan materi pendidikan pun bervariasi sesuai dengan konteks zamannya. Berikut ini adalah bagan mengenai sistem kurikulum dan materi pendidikan yang berkembang dari zaman kerajaan hingga kolonialisme Jepang

		Kurikulum	Materi Pendidikan
Zaman Kerajaan Aceh	Samudera Pasai	Elementer (Dasar)	a. Belajar Menulis dan membaca Hijaiyah b. Mempelajari fiqih Mazhab Syafi'i
		Advance (Tinggi)	a. Tajwid b. Lagu Kasida c. Pengajian kitab
	Perlak	Elementer (Dasar)	a. Belajar Menulis dan membaca Hijaiyah b. Membaca Alquran
		Majlis Taklim tinggi (Perguruan Tinggi)	a. B.Arab, Tasawuf, Mantiq b. Mempelajari kitab
	Aceh Darussalam	Meunasah (Rendah)	a. Membacamenulis b.Arab b. Ilmu agama
		Perguruan Tinggi	a. Teologi b. Metafisika c. Tasawuf
	Demak	Pesantren	a. Pengajaran agama b. Kitab suluk
	Mataram	Anak usia 7 tahun	a. Mengaji Al-quran

Kerajaan Jawa		Anak yang khatam Alquran	a. Mengkaji kitab
Zaman Kolonialisme Belanda & Jepang	Belanda	Salafiyah (pesantren)	a. Mengkaji kitab-kitab klasik
		Sekolah Islam	a. Mempelajari ilmu agama dan umum
	Jepang	Sekolah dasar (6) tahun	
		SMP(3) tahun	
		Sekolah menengah tinggi(3) tahun	
		Pesantren	
STAI (Jakarta)			

### E. Tujuan Pendidikan pada masa awal dan sebelum kemerdekaan

Tujuan pendidikan Islam dari masa awal perkembangannya hingga pengaruh kebijakan kolonialisme penjajah sangat diwarnai dengan berbagai latar belakang yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada setiap zamannya. Dibawah ini adalah urutan waktu dari zaman kerajaan hingga Kolonialisme penjajah yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam:

Zaman Kerajaan Aceh	Samudera Pasai	<b>Tujuan Pendidikan</b>
		Misi dakwah
		Cinta kepada ilmu dan Ulama
	Perlak	Menjadi Basis Pusat Pendidikan
		Menjadikan masyarakat yang berilmu
		Menjadikan kerajaannya menjadi pusat pendidikan
		Menciptakan para ulama yang berpengetahuan tinggi
Aceh Darussalam	Menjadikan aceh sebagai	

		pusat pendidikan
		Mengenalkan kerajaan aceh hingga ke manca negara
<b>Zaman Kerajaan Jawa</b>	<b>Demak</b>	Menyebarkan Islam ke pelosok nusantara
		Menjadikan masyarakat yang berakhlakul karimah
	<b>Mataram</b>	Menjalin kerjasama antara wali dengan kerajaan Demak
		Memperdalam ilmu agama Islam
		Menerjemahkan berbagai kitab
<b>Zaman Kolonialisme Belanda &amp; Jepang</b>	<b>Belanda</b>	Membentuk mental keagamaan
		Menjauhkan pendidikan dari kebijakan Belanda
		Menciptakan para kader bangsa yang anti penjajah
		Mencerdaskan bangsa
	<b>Jepang</b>	Membangun kurikulum pendidikan yang berbasis agama dan umum
		Melawan penjajah jepang
		mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan azaz perjuangan dakwah Islamiyyah dan amar ma'ruf nahi Munkar
		memdidik anak untuk berpikir rasional, mendidik anak agar bekerja sungguh-sungguh, membentuk manusia yang berwatak dan menanam persatuan.
		Memajukan Pendidikan Islam

### Nilai Moral Dalam Pendidikan

Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk praktek pendidikan: praktek pendidikan Hindu, pendidikan Budhis, pendidikan Islam, pendidikan

zaman VOC, pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman pendudukan Jepang, dan pendidikan zaman setelah kemerdekaan (Somarsono, 1985). Berbagai praktek pendidikan memiliki dasar filosofis dan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa praktek pendidikan yang relevan dengan pembahasan ini adalah praktek-praktek pendidikan modern zaman kolonial Belanda, praktek pendidikan zaman kemerdekaan sampai pada tahun 1965, dan praktek pendidikan dalam masa pembangunan sampai sekarang ini.

Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan Barat. Diharapkan praktek pendidikan Barat ini akan bisa mempersiapkan kaum pribumi menjadi kelas menengah baru yang mampu menjabat sebagai "*pangreh praja*". Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya. Yakni, menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, dengan pendidikan model Barat akan diharapkan muncul kaum bumi putera yang berbudaya barat, sehingga tersisih dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Pendidikan zaman Belanda membedakan antara pendidikan untuk orang pribumi. Demikian pula bahasa yang digunakan berbeda. Namun perlu dicatat, betapapun juga pendidikan Barat (Belanda) memiliki peran yang penting dalam melahirkan pejuang-pejuang yang akhirnya berhasil melahirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman Jepang meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang amat signifikan. Sebab, lewat pendidikan Jepang-lah sistem pendidikan disatukan. Tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing degan pengantar bahasa Belanda.

Kompromi yang diambil para funding father negeri ini adalah bahwa pengabaian sistem pendidikan Islam tradisional akan sangat menyakitkan umat Islam. Mengingat jasa dan pengorbanan para ulama dan santri dari trilogi sistem pendidikan Islam tersebut di atas. Pertimbangan lainnya adalah agar umat Islam memiliki lembaga pendidkkan khusus, sehingga mayoritas penduduk Indonesia tidak mengalami kekecewaan yang luar biasa kepada pemerintah. Oleh karena itu, pada masa kemerdekaan tepatnya pada 3 Januari 1946 didirikanlah Departemen Agama yang mengurus keperluan umat Islam. Meskipun pada dasarnya Departemen Agama ini mengurus keperluan seluruh umat beragama di Indonesia, namun melihat latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.

Sampai pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru pemisahan sistem dan pengelolaan pendidikan nasional dan pendidikan Islam masih dipertahankan.

Artinya adalah bahwa pengelolaan pendidikan Islam masih mengalami nasib yang tidak bagus dibanding dengan saudara mudanya, pendidikan nasional.

Demikianlah nasib perjalanan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih menduduki rangking kurang begitu bagus dibanding negara-negara lainnya. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan menitikberatkan pembangunan pada sector ekonomi menyebabkan pembangunan jiwa dan mental bangsa menjadi termarginalkan. Padahal pembangunan mental, jiwa, dan moral bangsa adalah sebuah keharusan dan keniscayaan sejarah yang tidak bisa ditawar-tawar, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pendidikan ekonomi tanpa didukung dengan pendidikan moral yang kuat hanya akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berpenyakit kronis.

Membaca model pendidikan karakter yang pernah dikembangkan di Kolese Gonzaga (1007-2008) dan baik untuk kita terapkan di sekolah yaitu Kejujuran, Komunikasi, dan Kesederhanaan. dan ijin saya untuk mengutipnya kembali pada bagian berikut ini.

### 1. Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui mana manusia mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (*truthfully*). Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia. Secara sederhana, kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya. Sikap ini terwujud dalam perilaku, baik jujur terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri (tidak menipu diri), serta sikap jujur terhadap motivasi pribadi maupun kenyataan batin dalam diri seorang individu.

Kualitas kejujuran seseorang meliputi seluruh perilakunya, yaitu, perilaku yang termanifestasi keluar, maupun sikap batin yang ada di dalam. Keaslian kepribadian seseorang bisa dilihat dari kualitas kejujurannya.

Konsep tentang kejujuran bisa membingungkan dan mudah dimanipulasi karena sifatnya yang lebih interior. Perilaku jujur mengukur kualitas moral seseorang di mana segala pola perilaku dan motivasi tergantung pada pengaturan diri (*self-regulation*) seorang individu.

Meskipun tergantung pada proses penentuan diri, kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat diri kita semata-mata yang benar. Seandainya toh kita telah meyakini bahwa pendapat kita merupakan pendapat yang menurut kita paling baik, perlulah tetap mendengarkan pendapat orang lain. Setiap keyakinan pribadi menyisakan bias subjektivitas yang bisa saja mengaburkan diri kita dalam memahami realitas sebagaimana adanya. Sikap jujur dengan demikian bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk senantiasa bersikap selaras dengan nilai-

nilai kebenaran (*to be thrutful*), sebuah usaha hidup secara bermoral dalam kebersamaan dengan orang lain.

Kualitas keterbukaan kita terhadap yang lain akan menentukan kadar kejujuran atau ketidakjujuran kita. Namun seringkali keterbukaan ini tergantung pada pemahaman diri kita terhadap realitas, termasuk pemahaman nilai-nilai moral yang kita yakini. Keyakinan moral seseorang bisa saja keliru. Namun persepsi diri kita tentang nilai-nilai moral tidaklah statis. Ia dinamis seiring dengan banyaknya informasi dan pengetahuan yang kita terima. Ketika kita menolak menerima adanya perspektif atau sudut pandang lain yang berbeda dengan diri kita, biasanya ini merupakan pertanda bahwa kita kurang memiliki interest terhadap kebenaran. Sikap demikian ini bisa dikatakan sebagai sikap abai terhadap nilai kejujuran (*dishonest*).

Mengupayakan nilai kejujuran tidak sama dengan memperjuangkan ideologi yang sifatnya lentur dan bisa berubah setiap saat. Inilah mengapa, meskipun kita tahu bahwa kejujuran itu sangat penting bagi kehidupan, nilai kejujuran sulit (untuk mengatakan tidak dapat) menjadi norma sebuah kultur masyarakat. Ideologi senantiasa mencari pendukung yang memperkuat gagasannya dan mendukung sudut pandangnya sendiri sementara menolak dan mengabaikan pandangan orang lain. Pendekatan ideologis menganggap bahwa cara-cara mereka merupakan satu-satunya cara yang benar. Pendekatan demikian mengikis praksis perilaku jujur dan meningkatkan konflik bagi setiap relasi antar manusia.

Kejujuran memiliki kaitan yang erat dengan kebenaran dan moralitas. Bersikap jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral seseorang. Dengan menjadi seorang pribadi yang berkualitas, kita mampu membangun sebuah masyarakat ideal yang lebih otentik dan khas manusiawi. Sokrates, misalnya, mengatakan, jika seseorang sungguh-sungguh mengerti bahwa perilaku mereka itu keliru, mereka tidak akan memilihnya. Seseorang itu akan semakin jauh dari kebenaran dan karena itu *dishonest* jika ia tidak menyadari bahwa perilakunya itu sesungguhnya keliru. Kesadaran diri bahwa setiap manusia bisa salah dan mengakuinya merupakan langkah awal bertumbuhnya nilai kejujuran dalam diri seseorang.

Kejujuran sejati, bukan sekedar kesediaan kita menerima diri dan orang lain sebagaimana adanya demi kelangsungan hidup bersama. Kejujuran sejati juga mengandaikan bahwa kita jujur tentang kemungkinan dan potensi yang kita miliki sebagai individu. Inilah dimensi kreatif dari makna kejujuran. Kita tidak sekedar menerima diri kita apa adanya. Menerima diri apa adanya adalah awal dari kejujuran. Namun ini belum cukup. Yang kita perlukan adalah pengembangan segala potensi dan kemungkinan yang kita miliki. Inilah yang senantiasa menjadi penjaga bagi kita dalam menghadapi setiap tantangan kedepan.

Untuk memahami lebih praktis perilaku kejujuran, seringkali akan lebih mudah bagi kita menunjukkan macam tindakan-tindakan ketidakjujuran dalam kerangka pendidikan. Perilaku tidak jujur dalam konteks pendidikan antara lain:

**Plagiarisme** (*plagiarism*). Sebuah tindakan mengadopsi atau mereproduksi ide, atau kata-kata, dan pernyataan orang lain tanpa menyebutkan nara sumbernya.

- **Plagiarisme karya sendiri** (*self plagiarism*). Menyerahkan/mengumpulkan tugas yang sama lebih dari satu kali untuk mata pelajaran yang berbeda tanpa ijin atau tanpa memberitahu guru yang bersangkutan.
- **Manipulasi** (*fabrication*). Pemalsuan data, informasi atau kutipan-kutipan dalam tugas-tugas akademis apapun.
- **Pengelabuan** (*deceiving*). Memberikan informasi yang keliru, menipu terhadap guru berkaitan dengan tugas-tugas akademis, misalnya, memberikan alasan palsu tentang mengapa ia tidak menyerahkan tugas tepat pada waktunya, atau mengaku telah menyerahkan tugas padahal sama sekali belum menyerahkannya.
- **Menyontek** (*cheating*). Berbagai macam cara untuk memperoleh atau menerima bantuan dalam latihan akademis tanpa sepengetahuan guru.
- **Sabotase** (*sabotage*). Tindakan untuk mencegah dan menghalang-halangi orang lain sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas akademis yang mesti mereka kerjakan. Tindakan ini termasuk di dalamnya, menyobek/menggunting lembaran halaman dalam buku-buku di perpustakaan, ensiklopedi, dll, atau secara sengaja merusak hasil karya orang lain.

Perilaku ketidakjujuran akademis ini telah banyak terjadi di dalam lingkup pendidikan, mulai dari lingkup sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dengan kadar pelanggaran yang berbeda. Pada masa kini, dalam lingkup akademik, perilaku ketidakjujuran akademis seperti ini dipandang sebagai perilaku negatif yang tidak terpuji. *"Honesty means there are no contradictions or discrepancies in thoughts, words, or actions. To be honest to ones real self and to the purpose of a task earns trust and inspires faith in others. Honesty is never to misuse that which is given in trust."*

## 2. Komunikasi

Setiap proses pendidikan tidak dapat menghindari diri dari kenyataan bahwa pendidikan tak lain adalah proses komunikasi. Tidak akan ada pendidikan tanpa komunikasi, sebab pendidikan merupakan intervensi sosial bagi pembentukan generasi muda agar mereka bertumbuh secara maksimal menjadi pribadi yang mandiri, dewasa dan bertanggungjawab.

Komunikasi senantiasa berkaitan dengan pembentukan komunitas, yaitu, sebuah keadaan hidup bersama yang saling membantu dan menumbuhkan setiap individu yang terlibat di dalamnya. Lembaga pendidikan sebagai sebuah

lembaga formasi merupakan komunitas *par excellence*. Karena itu, komunikasi menjadi cara bertindak paling dasariah bagi setiap insan yang terlibat dalam dunia pendidikan. Tanpanya, lembaga pendidikan kehilangan alasan keberadaannya (*raison d etre*).

Sebagaimana nilai kejujuran, komunikasi mengandaikan adanya sikap terbuka terhadap yang lain (baik terhadap individu maupun lingkungan). Keterbukaan dalam komunikasi membuat setiap individu yang terlibat dalam pendidikan mengetahui visi dan misi bersama yang akan diraih oleh sebuah lembaga pendidikan. Dengan demikian mereka mampu mengarahkan diri, pemikiran, tenaga dan perilakunya pada visi dan misi yang menjadi panduan bertindak sebuah lembaga pendidikan.

Komunikasi dalam pendidikan meliputi, komunikasi antar lembaga dengan individu (misalnya, antara yayasan dengan pihak pengurus sekolah), dan antar individu dalam sekolah (komunikasi antara guru-siswa, guru-guru, guru-karyawan, siswa-siswa, siswa-karyawan, karyawan-karyawan). Komunikasi dalam pendidikan juga termasuk di dalamnya komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, dalam hal ini, mereka diwakili oleh orang tua.

Komunikasi dalam lingkup akademis secara khusus tampil dalam kesediaan dialog dalam kerangka pengembangan kemampuan akademis siswa, yaitu, dialog antar guru dan siswa, pendampingan wali kelas terhadap siswa di kelas perwaliannya, komunikasi walikelas dengan orang tua. Semua jenis komunikasi ini diarahkan demi membantu siswa mencapai pengembangan kemampuan akademis dan kepribadian yang dipersyaratkan sesuai oleh pendidikan.

Ketiadaan komunikasi dapat dilihat dari gejala seperti ini, ketidakpuasan terhadap kebijakan sekolah, keluhan dari para siswa terhadap pendekatan pembelajaran tertentu yang dilakukan oleh guru, suasana tidak nyaman dalam bekerja karena masing-masing pihak mengutamakan ide dan gagasannya.

Singkatnya, pengembangan kemampuan komunikasi dalam lingkup sekolah mengandaikan adanya keterbukaan, pemahaman bersama akan visi dan misi, kesediaan untuk berdialog dan mencari jalan pemecahan terbaik jika terjadi konflik. Dalam segala hal, pribadi tersebut akan mengutamakan kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadinya.

### **3. Kesederhanaan (*simplicity*)**

Menanamkan nilai-nilai kesederhanaan menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik di tengah arus masyarakat yang memuja penggelojohan nafsu membeli. Nilai kesederhanaan berkaitan dengan sikap ugahari, yaitu, sebuah perilaku untuk mempergunakan sesuatu apa adanya sesuai kebutuhan, tidak melebihi apa yang seharusnya.

Dalam kerangka pendidikan, sikap sederhana ini bisa diwujudkan dalam penggunaan sarana dan prasarana secara maksimal demi pengembangan diri, semangat bekerja keras dalam belajar dan menempa diri. Sikap tidak sederhana biasanya tampil dalam, kegiatan yang sifatnya jor-joran, seperti, *prom nite* di hotel-hotel, pesta-pesta yang tidak berkaitan dan tak ada maknanya bagi proses pendidikan, penggunaan mobil ke sekolah tanpa ijin, pameran barang mewah (mobil, hp, dll), konsumsi berlebihan, membuang-buang waktu demi kesenangan percuma dan sia-sia, dan lain-lain.

Melalui tiga penekanan khas bagi pembentukan karakter, yaitu, kejujuran, komunikasi dan kesederhanaan, adalah sebagai wujud tanggungjawab sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan sebuah masyarakat yang lebih manusiawi, otentik, peka dan solider pada orang lain. Melalui tiga nilai ini, ingin merealisasikan hakekat pendidikan, yaitu manusia yang memiliki keunggulan, kompetensi, tanggungjawab, sikap terbuka, daya integratif dengan semangat pelayanan dan kepedulian."

### **Simpulan**

Kondisi Pendidikan Islam pada masa penjajahan cukup banyak mendapat tekanan dari pihak penjajah namun dengan semangat jiwa patriotisme dan semangat jihad di jalan Allah yang dimiliki oleh para pejuang Islam mampu melawan penjajah dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam sesuai dengan organisasi keagamaan yang telah dibentuk masing-masing tokoh pendidikan tersebut.

Latar belakang munculnya pendidikan Islam di Indonesia akibat adanya desakan penjajah untuk membatasi gerakan keagamaan dalam bidang pendidikan, di samping itu juga munculnya gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan dari tokoh Islam. Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia.

Sebelum masuknya penjajah Belanda, sistem pendidikan pribumi tersebut berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuai model pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu. Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik Spanyol, Portugis, dan Belanda dengan sifat kerakusan akan kekayaan dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Mustofa, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, untuk Fakultas Tarbiyah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Abdullah Taufik, Ed. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam Cet: 1*; Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1992.
- Azra, Azyumardi. *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama. *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI,
- Drs.Hasbullah, *Sejarah Pendidikan.*,
- Drs. Shodiq Mustafa, *Wawasan Sejarah Indonesia dan Dunia*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT.Grafindo Persad
- <http://anshori.blogspot.com/2009/04/pendidikan-Islam-zaman-penjajahan.html>
- <http://lena-unindrabioza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-zaman-penjajahan.html>
- Ibrahim, M, et.al., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: CV. Tumaritis, 1991.
- Khaeruddin. *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. CV. Berkah Utami, 2004.
- Nata, Abudin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Noer, Delian, *Gerakan Modern Islam di Indonesia.*, LP3ES., Jakarta, 1991.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Redja mudyaharjo, *pengantar pendidikan*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001.
- Suwendi, *sejarah dan pemikiran pendidikan Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hida Agung,1985.
- Zuhairini, Dra, Dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

**Muhammad Sabarudin**, lahir di Bandung, 04 November 1985, sekarang sedang dalam proses menyelesaikan pendidikan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Ilmu Agama Islam konsentrasi Ilmu Pendidikan Islam. Ia dapat dihubungi di alamat jalan Raya Cihampelas RT 02 RW 02 Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Phone: 081910581100, atau e-mail: [anikartika0@gmail.com](mailto:anikartika0@gmail.com)